



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GATOT SUGENG WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **118866**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.071.366.000

1. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 434.390.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m2/90 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 169.400.000
3. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 69.548.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 194.200.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/116 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.203.828.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 449.000.000

1. MOTOR, HONDA A/T VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS/BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 184.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 132.000.000

D. SURAT BERTAHAPAN

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 858.712.096



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.511.078.096

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.511.078.096

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.